

PENGARUH PROSES PERENCANAAN TERHADAP OPTIMALISASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Rotua Romauli Yetty Erawati Butar Butar, Apriana H. J. Fanggidae, Heri Wahyudi

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: butet73sumba@gmail.com, apriana.fanggidae@staf.undana.ac.id,
heriw@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Perencanaan memegang peranan penting dan utama dalam mencapai tujuan keberadaan organisasi. Perencanaan yang matang akan mencapai tujuan yang terbaik/maksimal. Perencanaan yang canggih diperoleh dengan mengembangkan rencana strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses perencanaan terhadap optimalisasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten Sumba Barat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh empat variabel yaitu pemrograman (programming), penganggaran (budgeting), penjadwalan (scheduling) dan kebijakan (policies) sebagai variabel bebas terhadap optimalisasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) sebagai variabel terikat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemrograman memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Penganggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Penjadwalan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Semakin baik kemampuan ASN di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumba Barat dalam membuat kebijakan, secara nyata meningkatkan optimalisasi perencanaan RENSTRA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Pemrograman, Penganggaran, Penjadwalan dan Kebijakan secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA.

Kata Kunci: Optimalisasi Perencanaan, Pemrograman, RENSTRA.

Abstract

Planning plays an important and major role in achieving the goals of an organization's existence. Careful planning will achieve the best / maximum goals. Sophisticated planning is obtained by developing strategic plans. This study aims to determine the effect of the planning process on optimizing the preparation of strategic plans

How to cite:	Romauli, Rotua et al., (2022) Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, <i>Syntax Literate</i> : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat

(RENSTRA) at the West Sumba district youth and sports agency. In this study, the authors used a quantitative descriptive approach which aims to determine the effect of four variables namely programming, budgeting, scheduling and policies as independent variables on the optimization of strategic planning (RENSTRA) as the dependent variable. . The results of this study state that programming has a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning. Budgeting has a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning. Scheduling has a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning. Policies have a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning. The better the ability of ASN within the West Sumba Regency Regional Apparatus Organization (OPD) in making policies, significantly increases the optimization of RENSTRA planning in the Regional Apparatus Organization (OPD). Programming, Budgeting, Scheduling and Policies together have a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning.

Keywords: *Optimization of Planning, Programming, RENSTRA.*

Pendahuluan

Perencanaan memegang peranan penting dan utama dalam pencapaian tujuan dari keberadaan sebuah organisasi. Perencanaan yang matang akan mencapai tujuan yang optimal/maksimal. Perencanaan yang matang diperoleh melalui penetapan rencana strategis. Rencana strategis memiliki dimensi waktu jangka menengah dan jangka panjang. Rencana strategis membawa sebuah organisasi siap dalam menghadapi hambatan atau tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada.

RENSTRA merupakan rencana strategis yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini RENSTRA menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan/dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Dalam dokumen RENSTRA yang disusun, diketahui bahwa indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap tujuan dari sebuah organisasi. Dalam hal ini Indikator Kinerja (IK) akan digunakan secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja tersebut dijabarkan dan ditetapkan kedalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh organisasi perangkat daerah sebagai dasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang tentunya tetap mengacu pada sasaran strategis dan RPJMD sekaligus juga menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari RENSTRA tersebut.

Jadi melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja sebuah perangkat daerah dapat diukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan penyusunan RENSTRA yang sudah optimal maka dapat dipastikan kinerja organisasi perangkat daerah tersebut juga akan optimal. Kinerja dimaksud dimulai dengan tahap perencanaan (*ex-ante*), selanjutnya tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) (Oktavianti, 2021).

Dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya, seorang kepala daerah baik yang berada ditingkat provinsi maupun kabupaten dibantu oleh unsur perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Unsur perangkat daerah ini dikenal juga dengan sebutan organisasi perangkat daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Sumba Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang berperan membantu Bupati Sumba Barat dalam melaksanakan urusan dibidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. DISPORA Kabupaten Sumba Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan pembentukan DISPORA adalah memberikan pelayanan publik seoptimal mungkin dibidang kepemudaan dan olahraga yang dapat menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini ditindaklanjuti dengan perencanaan yang baik dibidang kepemudaan dan olahraga yang tepat sasaran, spesifik, dapat diimplementasikan serta mewakili seluruh keadaan baik dimasa kini maupun yang akan datang dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Terkait hekekatnya, DISPORA wajib menyusun dokumen RENSTRA dalam bentuk dokumen perencanaan lima tahunan, yang merupakan penjabaraan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Secara kuantitas dan kualitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat diberi ruang dan peluang yang lebih besar oleh daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan dan menghasilkan kepemudaan dan olahraga di daerah. Peningkatan tersebut harus memiliki arah yang jelas, yaitu penetapan indikator kinerja/indikator kinerja utama melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja/indikator kinerja utama yang akan dibutuhkan.

Disebutkan (Gunawan, 2012) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 1, ayat 37, indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Selain itu juga IKU menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban RENSTRA

Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat

organisasi. Mengacu hal tersebut disimpulkan bahwa indikator kinerja, IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Adapun *Key Performance Indikator/Indikator Kinerja Utama (IKU)* yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat berdasarkan fungsi dan tugasnya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: P.174/PORA/424.1/53.12/09/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021 (Amri, 2020).

Pada tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat di atas, penulis melihat adanya kejanggalan (Abidin, 2008). Dimana IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tidak berbicara / berfokus pada 2 (dua) urusan yaitu kepemudaan dan keolahragaan melainkan hanya berbicara/ berfokus pada 1 (satu) urusan saja yaitu keolahragaan. Selain itu peneliti juga melihat adanya inkonsistensi / ketidaksesuaian dalam menetapkan indikator kinerja utama terhadap sasaran strategis yang dituangkan dalam RENSTRA DISPORA dan Sasaran RPJMD yang dipacu. Hal inilah yang menjadi awal ketertarikan penulis untuk melihat keoptimalan penyusunan RENSTRA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tersebut.

Secara sederhana (Haming & Nurnajamuddin, 2007) mencoba melakukan peninjauan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat yaitu Dokumen RENSTRA dan dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat dengan harapannya hasil peninjauan tersebut mampu menjawab dan menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan dan solusi terhadap masalah yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dari hasil peninjauan, diketahui terdapat beberapa kendala (masalah) yang menyebabkan tidak optimalnya penyusunan RENSTRA 2016-2021 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat. Ketidacermatan penetapan IKU dalam penyusunan RENSTRA mengakibatkan penetapan program / kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tidak maksimal. Hal ini menyebabkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tidak dapat dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Akibatnya perolehan hasil pengukuran / penilaian evaluasi kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat menjadi sangat rendah. Rendahnya perolehan hasil pengukuran / penilaian akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat menyumbangkan perolehan hasil pengukuran / penilaian akuntabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat juga menjadi tidak maksimal.

Diketahui dokumen RENSTRA memiliki keterkaitan / hubungan erat dengan SAKIP. Dalam hal ini RENSTRA menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). RENSTRA merupakan dasar atau masukan (*input*) bagi rangkaian penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan keluaran (*output*) berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Telah disebutkan sebelumnya di atas, RENSTRA oleh organisasi perangkat daerah digunakan sebagai dasar / titik permulaan dalam mencapai tujuannya baik tujuan jangka pendek maupun jangka menengah dengan menerapkan cara terbaik melalui kebijakan, program, kegiatan anggaran dan indikator serta target yang direncanakan didalamnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Kemudian RENSTRA dijabarkan ke dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang sekaligus menjadi gambaran dari kinerja organisasi perangkat daerah tersebut. Secara kualitatif / kuantitatif kinerja daripada organisasi perangkat daerah tersebut dapat diukur melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) (RIKUN et al., 2020).

Fakta serupa juga ditemukan dalam hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Diketahui bahwa hasil penilaian Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai dengan Tahun 2020 belum optimal yaitu masih mendapat Predikat C seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perencanaan memegang peranan yang penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Perencanaan yang matang akan mencapai tujuan yang optimal / maksimal. Mengutip sebuah istilah yang populer dibidang perencanaan, “Gagal Merencanakan sama dengan Merencanakan Kegagalan”.

Perencanaan yang matang diperoleh melalui penetapan rencana strategis. Pengertian rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan sedangkan strategi adalah menggunakan semua sumberdaya (Syafaruddin, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian rencana strategi merupakan rancangan dengan menggunakan semua sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Efektif disini adalah pencapaian tujuan (*goal*) secara maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan, sedangkan efisien adalah pencapaian tujuan menjadi lebih maksimal dengan menghemat biaya, tenaga, atau pun waktu. Pentingnya menyelaraskan kedua indikator tersebut yakni efektif dan efisien agar setiap tujuan, baik itu individu maupun organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat

Telah disebutkan sebelumnya (Tirtayasa, 2019), RENSTRA merupakan dokumen perencanaan strategis yang memiliki peranan sangat penting dalam penilaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah terkait pencapaian tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam RENSTRA organisasi perangkat daerah tertuang kebijakan, program, kegiatan anggaran dan indikator serta target yang direncanakan sebagai sebagai upaya / cara terbaik yang diterapkan dalam pencapaian tujuannya baik tujuan jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun). Kebijakan, program, kegiatan anggaran dan indikator serta target yang direncanakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA menjadi alat ukur kinerja daripada organisasi perangkat daerah tersebut.

Optimalisasi penyusunan RENSTRA tidak luput dari kecermatan dalam penyusunan RENSTRA tersebut. Yang dimaksud adalah kecermatan terhadap kesesuaian / keselarasan antar dokumen perencanaan dimulai dari dokumen RPJMD, yang diindikasikan dengan terakomodirnya program strategis yang tetap terjaga kesesuaiannya dengan visi, misi, RPJMD, dan pencapaian kerjanya. Visi dan misi melahirkan tujuan dan sasaran, dimana misi ini dirumuskan ke dalam isu strategis. Sedangkan sasaran adalah strategi yang akan dilaksanakan. Sasaran inilah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan indikator (indikator kinerja dan indikator kinerja utama). Jadi ketidakcermatan dalam penyusunan RENSTRA menyebabkan ketidak optimalan pada RENSTRA dimana hal ini tentu berdampak pada ketidak optimalan kinerja dari organisasi perangkat daerah tersebut.

Kinerja organisasi perangkat daerah dimulai dengan tahap perencanaan (*ex-ante*), selanjutnya tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Data berupa program, anggaran, jadwal dan kebijakan merupakan bagian yang penting dalam sebuah efisiensi dan efektifitas proses perencanaan strategis dan merupakan unsur dari sebuah proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejalan dengan teori yang ditulis oleh (Widodo, 2019), yang menyebutkan terdapat 7 (tujuh) komponen variabel aktivitas perencanaan yaitu: peramalan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, dan penetapan dan interpretasi kebijakan.

Untuk mengarahkan tujuan dan program tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan yang sekaligus berperan untuk melindungi tujuan dan program dimaksud. Keberhasilan pelaksanaan sebuah program/kegiatan tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang memadai dan mendukung pelaksanaan program/kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, dalam setiap proses atau tahapan perencanaan sebuah program, ketersediaan anggaran menjadi unsur yang wajib diperhatikan. Sedangkan penjadwalan dalam sebuah proses perencanaan, menjadi unsur berikutnya yang juga wajib dibuat atau dirancang guna menghasilkan output yang sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Unsur kebijakan dibutuhkan dalam rangka mengarahkan proses perencanaan sejalan dengan visi dan misi organisasi yang termuat dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Dengan kebijakan yang

tepat, maka tujuan dan sasaran sebuah proses perencanaan akan dapat menjawab isu strategis yang ditetapkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif (Yuliani, 2018) dan pendekatan kuantitatif (Hariani et al., 2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh empat variabel yaitu pemrograman (*programming*), penganggaran (*budgeting*), penjadwalan (*scheduling*) dan kebijakan (*policies*) sebagai variabel bebas terhadap optimalisasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) sebagai variabel terikat.

Untuk mengetahui keterkaitan/hubungan pengaruh antar variabel, peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dulu konsepsi sebagai variabel-variabel yang berhubungan berasal dari teori yang sudah ada, kemudian mencari data dengan menggunakan kuesioner dan mengolah data tersebut menggunakan system komputerisasi programi SPSSi versi 24 (Mustaqim, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Profil responden yang menjadi obyek penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode yang digunakan adalah menghitung persentase responden berdasarkan karakteristik demografi tertentu. Ringkasan hasil analisis deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Deskripsi Responden Berdasarkan Karakteristik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Hasil analisis deskriptif pada karakteristik asal dinas/badan/bagian PNS diketahui bahwa 15 orang responden (22,1%) berasal dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 12 orang responden (17,6%) berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 10 orang responden (14,7%) berasal dari Badan Keuangan, dan Aset Daerah, 7 orang responden (10,3%) berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, 10 orang responden (14,7%) berasal dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, 3 orang responden (4,4%) berasal dari Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah, 4 orang responden (5,9%) berasal dari Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah, 3 orang responden (4,4%) berasal dari Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, 2 orang responden (2,9%) berasal dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, dan 2 orang responden (2,9%) berasal dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

Hasil ini (Afandi, 2018) menunjukkan bahwa profil besaran populasi (jumlah) ASN pada organisasi perangkat daerah sangat menentukan banyaknya jumlah ASN yang menjadil profil responden yang terlibat dalam proses perencanaan di lingkup organisasi perangkat daerah tersebut. Dimana secara kuantitas semakin banyak jumlah ASN yang terlibat dalam proses perencanaan pada sebuah organisasi perangkat daerah maka

semakin banyak sumbangsih pemikiran / informasi yang diperoleh terkait perencanaan sehingga pengambilan keputusan dari sejumlah usulan pilihan mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di masa depan dalam mencapai tujuan yang diinginkan semakin lebih tepat serta pengendalian, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan hasil perencanaan tersebut lebih sistematis dan lebih berkesinambungan. Hal ini juga berkaitan dengan optimalisasi proses penyusunan rencana strategis lingkup organisasi perangkat daerah, dimana secara kuantitas ditunjukkan dengan jumlah ASN yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis tersebut.

B. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Hasil analisis deskriptif pada karakteristik mengenai jenis kelamin ASN yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang responden (64,71%) dan perempuan sebanyak 24 orang responden (35,29%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN dilingkup Organisasi perangkat Daerah yang berkontribusi/berkaitan dalam proses perencanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh laki-laki.

Dominasi ASN berjenis kelamin laki-laki di lingkup organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat yang berkontribusi / berkaitan dengan proses perencanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat menunjukkan bahwa peluang laki-laki untuk menjadi ASN lebih besar dari pada perempuan, dan peluang laki-laki lebih berkompetensi juga lebih besar dibandingkan perempuan (Widodo, 2019). Hal ini disebabkan antara lain adanya konstruksi sosial yang masih tertanam dan mempengaruhi persepsi dimasyarakat secara umum, yaitu anak laki-laki lebih leluasa dan memiliki akses untuk bersekolah dan bekerja sedangkan anak perempuan lebih terbatas dan pilihan tinggal dirumah menjadi ibu rumah tangga yang merawat keluarga merupakan pilihan yang lebih ditekankan oleh keluarga. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa ASN berjenis kelamin laki-laki dianggap lebih memiliki kecakapan (keahlian maupun keterampilan) dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah. Selain itu laki-laki juga dianggap lebih leluasa dalam mengatur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi proses perencanaan.

C. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.

Hasil analisis deskriptif pada karakteristik mengenai usia ASN yang menjadi responden secara berurutan menurut kelompok umur terlihat kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 30 orang responden (44,12%) disusul kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 17 orang responden (25,00%), kelompok umur > 50 tahun sebanyak 15 orang responden (22,06%), kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 5 orang responden (7,35%) dan terakhir kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 1 orang responden (1,47%).

Tingginya persentase responden pada kelompok usia 41-50 tahun menunjukkan bahwa kelompok usia ini adalah kelompok usia yang dianggap lebih berpengalaman dan

telah bekerja / mengabdikan sebagai ASN diatas 6 tahun (Archer, 2010). Hal ini dihitung dari batas usia maksimum menjadi seorang ASN yaitu 35 tahun. Kematangan usia ini mengindikasikan kematangan pengalaman kerja (berpengalaman) terhadap profesi, tugas dan fungsinya di lingkup organisasi.

D. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.

Tingginya jumlah responden dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) disebabkan karena ASN yang ada di lingkup OPD Kabupaten Sumba Barat telah menyadari dan memahami betul arti pentingnya pendidikan dalam menunjang kariernya dimana latar belakang pendidikan menjadi penentu dalam penggolongan/eselon seorang ASN dan peluang dalam mengemban karir pada jabatan tertentu (Antonio et al., 2007). Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang memadai, seorang ASN dapat lebih cakap dan berinovasi dalam bekerja. Dengan kata lain latar belakang pendidikan yang memadai akan menjadikan seorang ASN dipandang lebih mampu membaca, mendengarkan, dan memahami berbagai informasi dalam penyusunan perencanaan strategis pada perangkat daerahnya. Selain itu secara nasional, kebijakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi jabatan/formasi fungsional seperti perencana maupun fungsional lainnya sudah dipersyaratkan pendidikan minimal S1/ sederajat, sehingga jumlah ASN dengan latar belakang pendidikan S1 cukup besar pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

E. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan.

Tingginya jumlah responden yang berjabatan (memiliki jabatan) baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional jika dibandingkan dengan responden yang tidak berjabatan (fungsional umum) mengindikasikan bahwa ASN yang menjadi responden sudah memiliki keahlian maupun keterampilan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di lingkup organisasi dimana ia berada. Selain itu dengan jabatan yang diembannya, responden lebih leluasa dalam pengambilan keputusan terhadap sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan didalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

F. Penilaian Responden Pada Variabel Penelitian.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban responden pada setiap variabel yang diteliti. Metode yang digunakan dengan menghitung nilai rata-rata atas jawaban yang diberikan responden pada variabel pemrograman, anggaran, penjadwalan, kebijakan, dan optimalisasi perencanaan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.

Kesimpulan

Pemrograman memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Semakin baik kemampuan ASN di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan pemrograman, secara nyata meningkatkan optimalisasi perencanaan RENSTRA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Penganggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Semakin baik kemampuan ASN di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan penganggaran, secara nyata meningkatkan optimalisasi perencanaan RENSTRA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Abidin, S. Z. (2008). *Strategi kebijakan dalam pembangunan dan ekonomi politik*. Suara Bebas.
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Amri, F. (2020). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur*. Universitas Islam Riau.
- Antonio, M. S., Sholehudin, C. H., & Mhd, N. (2007). *Muhammad SAW: The super leader super manager*. ProLm Centre.
- Archer, T. S. (2010). *The Efficiency Theory: Improving Society by Eliminating Wasteful Programs, Restructuring the Economy, and Fixing Education*. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform. Retrieved from <http>
- Gunawan, I. (2012). *Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penyusunan Rpjmd Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015*. Universitas Gadjah Mada.
- Haming, M., & Nurnajamuddin, M. (2007). *Manajemen Produksi Modern Buku 2: Operasi Manufaktur dan Jasa*.
- Hariani, H., Fitriani, A. D., & Sari, M. (2022). *Manajemen Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021*. *Miracle Journal*, Vol 2, No.
- Mustaqim, M. (2016). *Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif/Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif*. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Oktaviyanti, R. (2021). *Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap kinerja Pegawai Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai*. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- RIKUN, A., Lengkong, F. D., & Plangiten, N. (2020). *Manajemen Pelayanan Penanggulangan Hiv/Aids Pada Komisi Penanggulangan Aids (Kpa) Kota Manado*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(85).
- Syafaruddin, S. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan: konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta.
- Tirtayasa, S. (2019). *Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap*

Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat

kinerja pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 45–54.

Widodo, E. S. (2019). *Peran Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana (Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Airlangga.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.

Copyright holder:

Rotua Romauli Yetty Erawati Butar Butar, Apriana H. J. Fanggidae, Heri Wahyudi
(2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

